

ABSTRAK

PERDAGANGAN ILEGAL PAKAIAN BEKAS DI INDONESIA DI TENGAH KEBIJAKAN LARANGAN IMPOR MELALUI KONSEP PROTEKSIONISME TAHUN 2019—2024

Oleh

ANDI WIJAYA

Perdagangan pakaian bekas impor ilegal di Indonesia masih terus terjadi dan menyebabkan kerugian langsung pada industri tekstil dalam negeri. Walaupun pemerintah sudah menerapkan larangan impor lewat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 sebagai bentuk kebijakan proteksionisme Friedrich List, praktik ini tetap marak di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu alasan mengapa perdagangan ilegal tersebut bisa bertahan, sekaligus menilai efektivitas kebijakan proteksionisme dalam melindungi pasar lokal dari persaingan global.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pedagang pakaian bekas, vendor tekstil lokal, dan konsumen. Selain itu, peneliti juga melakukan studi dokumentasi terhadap data perdagangan dan aturan pemerintah. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti melakukan observasi langsung di pasar tradisional dan pusat penjualan pakaian bekas. Analisis data menggunakan konsep proteksionisme dengan fokus pada perlindungan industri bayi (*Infant Industry*) dan kepentingan nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada kebijakan larangan impor, pakaian bekas ilegal masih tetap masuk ke Indonesia dikarenakan banyaknya permintaan masyarakat Indonesia terhadap baju bekas ilegal. Upaya perlindungan negara ternyata belum mampu melawan daya tarik pasar global. Akibatnya, tujuan pemerintah untuk melindungi industri tekstil lokal belum berjalan maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan proteksionisme Indonesia tidak didukung sepenuhnya oleh masyarakat, sehingga meskipun ada larangan, perdagangan pakaian bekas ini masih tetap berjalan di dalam negeri.

Kata Kunci: Perdagangan Ilegal, Pakaian Bekas, Proteksionisme, Industri Tekstil, Kebijakan Impor.

ABSTRACT

ILLEGAL TRADE OF USED CLOTHING IN INDONESIA AMIDST IMPORT PROHIBITION POLICY THROUGH THE CONCEPT OF PROTECTIONISM 2019–2024

By

ANDI WIJAYA

The illegal trade of imported used clothing in Indonesia continues to occur, causing direct losses to the domestic textile industry. Although the government has implemented an import ban through the Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022 as a form of Friedrich List's protectionism policy, this practice remains widespread in the field. This study aims to find out the reasons why this illegal trade persists, as well as to evaluate the protectionism policy in protecting the local market from global competition.

This study uses a descriptive qualitative method. Data collection was carried out through in-depth interviews with used clothing traders, local textile vendors, and consumers. In addition, the researcher also conducted a documentation study on trade data and government regulations. To ensure data validity, the researcher conducted direct observations in traditional markets and used clothing sales centers. Data analysis uses the concept of protectionism with a focus on infant industry protection and national interests.

The results show that despite the import ban policy, illegal used clothing still enters Indonesia due to the high demand from the Indonesian public for these clothes. State protection efforts have not been able to counter the appeal of the global market. As a result, the government's goal to protect the local textile industry has not been fully achieved. This shows that Indonesia's protectionism policy is not fully supported by the public, so even with the ban in place, the trade of used clothing continues to run domestically.

Keywords: Illegal Trade, Second-hand Clothing, Protectionism, Textile Industry, Import Policy.